

BAB II

GAMBARAN UMUM

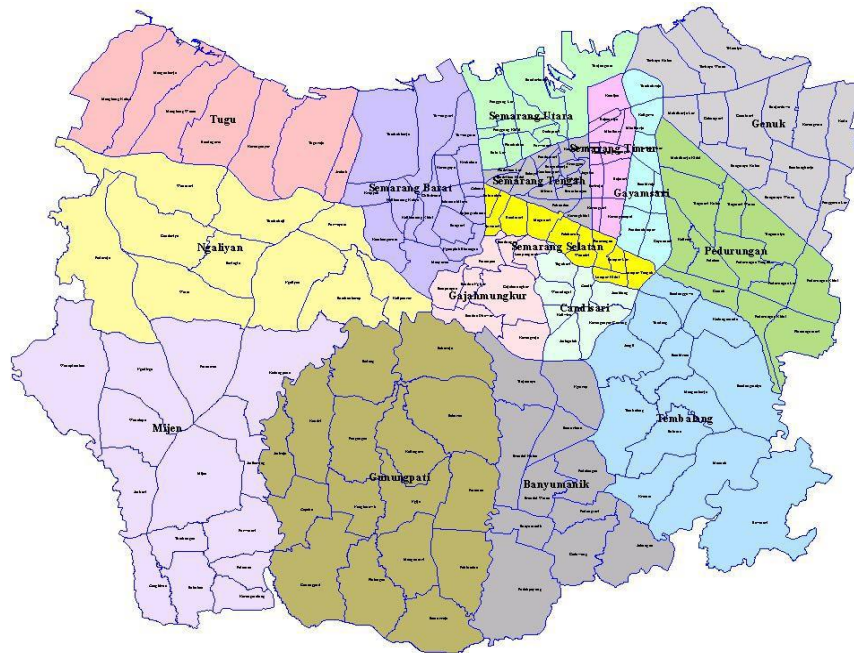
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Bahkan, Area Metropolitan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan) dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa, merupakan Wilayah Metropolis terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbang kertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota. Sayangnya, pesatnya jumlah penduduk membuat kemacetan lalu lintas di dalam Kota Semarang semakin macet. Kota Semarang dipimpin oleh wali kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kota ini terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara). Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Luas Kota 373.67 km².

2.1.1 Letak Geografis

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber : www.SemarangKota.go.id

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan /tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah.

Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Bawah sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang

berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Tabel 2.1

Ketinggian Tempat Kota Semarang

Bagian Wilayah Region Ketinggian (m) diatas permukaan air laut Elevation above the Sea Level	
1. Daerah Pantai Coast	0,75
2. Pusat Keramaian Kota Downtown	2,45
3. Simpang Lima Simpang Lima	3,49
4. Candi Baru Candi Baru	90,56
5. Jatingaleh Jatingaleh	136,00
6. Gombel Gombel	270,00
7. Gunungpati (Sebelah Barat) Gunungpati (West Side)	259,00
Gunungpati (Sebelah Timur Laut) Gunungpati (Northeast)	348,00
8. Mijen (Bagian Atas) Mijen	253,00

Sumber : www.Semarangkota.bps.go.id

2.1.2 Batas Wilayah

Adapun wilayah administrasi Kota Semarang berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Laut Jawa	6°50'LS
Sebelah Selatan	: Kabupaten Semarang	7°10'LS
Sebelah Barat	: Kabupaten Kendal	109°50'BT
Sebelah Timur	: Kabupaten Demak	110°35'BT

2.1.3 Klimatologi

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata

yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

Tabel 2.2

Curah Hujan di Kota Semarang

Bulan	Curah Hujan Kota Semarang (Mm)		
	2013	2014	2015
Januari	477	736	238
Februari	378	377	273
Maret	204	157	212
April	296	74	258
Mei	222	182	185
Juni	347	129	69
Juli	115	182	2
Agustus	82	10	6
September	20	0	1
Oktober	99	45	0
November	146	194	280
Desember	242	193	209

Sumber : www.SemarangKota.go.id

2.1.4 Demografi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.572.105 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2013 sebesar 0,83 %. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan hasil yang nyata. Sekitar 71,57 % penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64) th, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 th keatas) pada tahun 2012 sebesar 39,72 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk usia tidak produktif. Pada kurun waktu 5 tahun (2009-2013), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Selatan sebagai wilayah terpadat, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah.

Tabel 2.3

Jumlah Kepadatan Penduduk di Kota Semarang Tahun 2014-2016

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)								
	Luas Wilayah			Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Mijen	57.55	57.55	57.55	56 570	61 405	63 348	983	1 066.99	1 101
Gunungpati	54.11	54.11	54.11	75 027	78 641	79 984	1 387	1 453.35	1 478
Banyumanik	25.69	25.69	25.69	128 225	132 508	133 489	4 991	5 157.96	5 196
Gajahmungkur	9.07	9.07	9.07	63 430	63 707	63 766	6 993	7 023.93	7 030
Smg Selatan	5.93	5.93	5.93	82 931	79 620	79 162	13 990	13 431.17	13 354
Candisari	6.54	6.54	6.54	79 902	79 258	78 863	12 217	12 118.96	12 059
Tembalang	44.20	44.20	44.20	142 941	156 868	159 066	3 234	3 549.05	3 599
Pedurungan	20.72	20.72	20.72	175 770	180 282	181 629	8 483	8 700.87	8 766
Genuk	27.39	27.39	27.39	91 527	97 545	99 508	3 342	3 561.34	3 633
Gayamsari	6.18	6.18	6.18	73 584	74 178	74 122	11 913	12 008.74	12 000
Smg Timur	7.70	7.70	7.70	78 889	77 331	76 608	10 245	10 042.99	9 949
Smg Utara	10.97	10.97	10.97	127 921	127 752	127 132	11 661	11 645.58	11 589
Smg Tengah	6.14	6.14	6.14	71 674	70 179	69 711	11 673	11 429.80	11 353
Smg Barat	21.74	21.74	21.74	158 981	158 131	157 554	7 313	7 273.74	7 247
Tugu	31.78	31.78	31.78	30 904	31 954	32 041	972	1 005.48	1 008
Ngaliyan	37.99	37.99	37.99	120 922	125 828	126 734	3 183	3 312.13	3 336
Kota Semarang	373.70	373.70	373.70	1 559 198	1 595 187	1 602 717	4 172	4 268.69	4 289

Sumber : Badan Pusat Statistik Semarang

Tabel 2.4

Data Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kota Semarang

Kelompok Umur	2013			2014			2015		
	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)			Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)			Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah	Laki laki	Perempuan	Jumlah	Laki laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	65 631	60 246	125 877	66 287	60 857	127 144	66 803	61 357	128 160
5 - 9	65 099	59 980	125 079	65 752	60 565	126 317	66 254	61 042	127 296
10 - 14	62 640	58 791	121 431	63 248	59 357	122 605	63 727	59 813	123 540
15 - 19	71 021	74 644	145 665	71 639	75 226	146 865	72 127	75 689	147 816
20 - 24	76 398	77 705	154 103	76 898	78 228	155 126	77 340	78 683	156 023
25 - 29	73 987	74 578	148 565	74 571	75 206	149 777	75 059	75 735	150 794
30 - 34	68 859	69 535	138 394	69 474	70 167	139 641	69 952	70 678	140 630
35 - 39	61 316	63 031	124 347	61 878	63 593	125 471	62 314	64 053	126 367
40 - 44	57 042	61 032	118 074	57 566	61 543	119 109	57 976	61 953	119 929
45 - 49	50 860	54 908	105 768	51 284	55 308	106 592	51 613	55 640	107 253
50 - 54	44 775	44 900	89 675	45 108	45 178	90 286	45 370	45 403	90 773
55 - 59	33 420	30 606	64 026	33 621	30 743	64 364	33 785	30 869	64 654
60 - 64	17 757	18 806	36 563	17 841	18 890	36 731	17 904	18 954	36 858
65 +	32 373	42 167	74 540	32 538	42 340	74 878	32 673	42 500	75 173

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

2.2 Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) Kota

Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1 / 179 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinaskertrans diganti atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

Bahwa berdasarkan pasal 85 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah maka ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kota Semarang.

2.2.1 Sejarah

Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.

Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kuartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai terjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 junto Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak

mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.

Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana, pada saat itu kegiatan Kementerian Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor :12 Tahun 1959 dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D).

Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I sampai dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus. Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian

Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I). Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja Depnaker ditetapkan dengan Kepmenaker No. Kep 199/Men/1984 sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi Nomor : Kep-55A/Men/1983.

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001.

Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Di daerah dengan adanya otonomi daerah pada tahun 2000 Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi, Cabang Dinas Tenaga Kerja, digabung menjadi satu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, serta Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/179 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Disnakertrans Kota Semarang.

Dalam perkembangan selanjutnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1 / 179 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinakertrans diganti atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

Bahwa berdasarkan pasal 85 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah maka ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kota Semarang.

2.2.2 Visi Dan Misi

Visi : Terwujudnya Iklim Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang kondusif dan berkualitas menuju masyarakat sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan transmigrasi.
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial.
4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
5. Meningkatkan sarana pelayanan ketenaga-kerjaan dan ketransmigrasian.

2.2.3 Dasar Hukum

Dalam melaksanakan misi tersebut Disnakertrans berlandaskan ketentuan sebagai berikut :

Undang - undang No. 15 tahun 1997 ttg Ketransmigrasian.

Undang – undang No. 32 tahun 2004 ttg Pemerintah Daerah.

Undang – undang No. 25 tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang – undang No. 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri No. PER-06/ MEN/ III/ 2006. tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 – 67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Keputusan Walikota Semarang No. 27 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- 2) Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- 3) Pembinaan pencari kerja, perlindungan pekerja, syarat -syarat kerja, kesejahteraan pekerja pada sektor informal dan penyelenggaraan transmigrasi.
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan perundang- undangan ketenagakerjaan.
- 5) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Daerah.
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

2.3 Gambaran umum UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kota Semarang.

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di kalangan industry/lembaga, diperlukan pelatihan dengan program yang sesuai kebutuhan industri, instansi/lembaga tersebut. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan pelatihan tenaga kerja yang

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, industry, instansi/lembaga dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang profesinya melalui pelatihan yang berbasis kompetensi.

2.3.1 Sejarah UPTD BLK Disnaker Kota Semarang

1. UPTD BLK Disnaker Kota Semarang didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kota Semarang.
2. Pada tahun 2009, UPTD BLK Disnaker berkantor dengan menempati gedung bekas Dinas Perburuhan yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 6A Gayamsari Semarang.
3. Pada tahun 2013 dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta rencana pembangunan gedung baru, maka pelatihan dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan swasta yang ditunjuk oleh UPTD BLK Disnaker Kota Semarang.
4. Pada tahun 2013 gedung baru UPTD BLK Disnaker Kota Semarang telah selesai dibangun. Terhitung mulai tahun anggaran 2014, pelatihan dilaksanakan di gedung UPTD BLK Disnaker Kota Semarang Jl. Slamet Riyadi No. 6A Gayamsari Semarang hingga saat ini.
5. UPTD BLK Disnaker Kota Semarang memiliki 5 ruang kelas dengan 11 jenis pelatihan, yang terdiri dari :

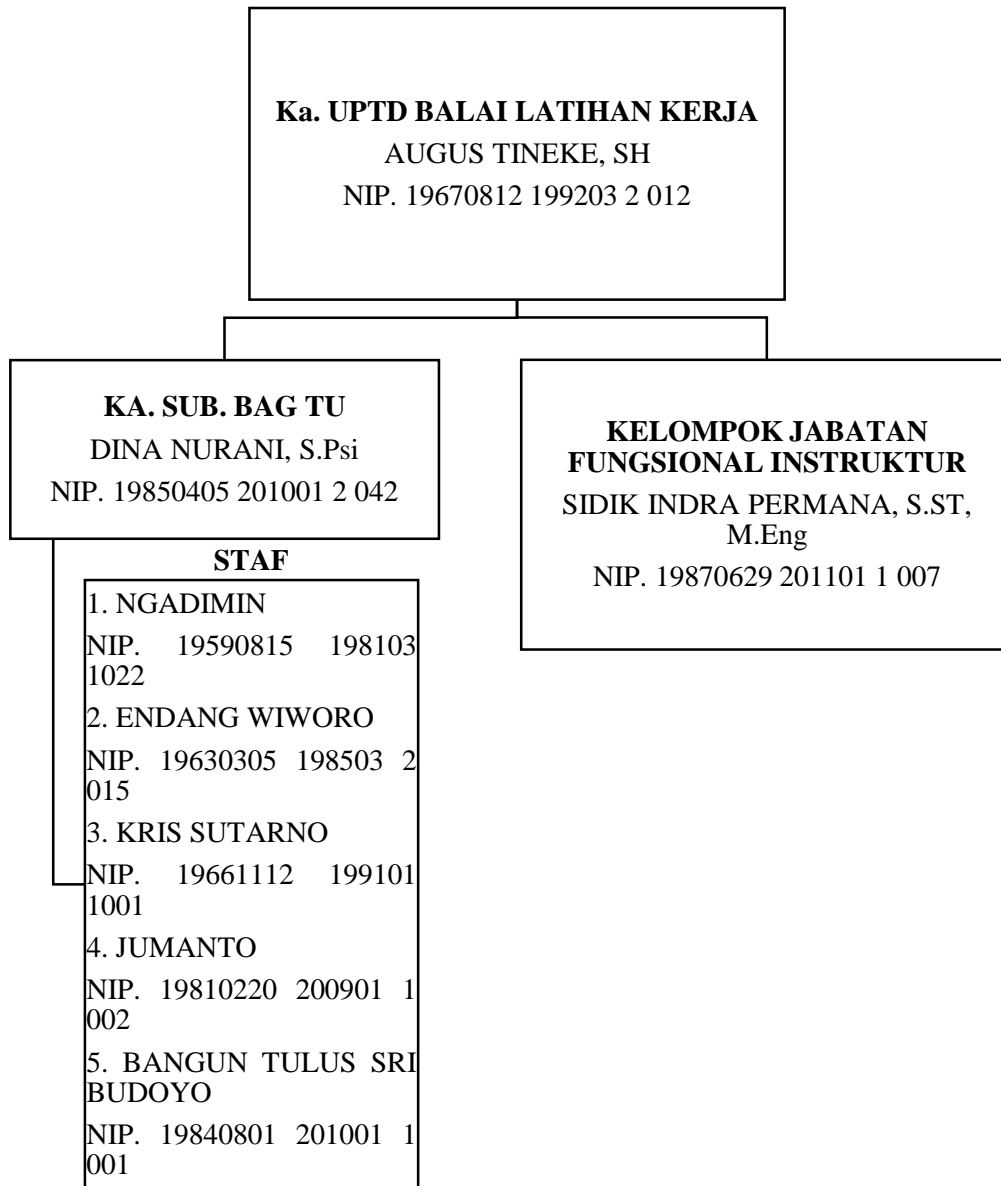
- a. Ruang kelas tata kecantikan digunakan untuk pelatihan tata kecantikan.
 - b. Ruang kelas menjahit digunakan untuk pelatihan menjahit garmen, menjahit modiste, mekanik mesin jahit, dan border.
 - c. Ruang kelas komputer digunakan untuk pelatihan desain grafis, operator komputer dan teknisi HP.
 - d. Ruang kelas otomotif digunakan untuk pelatihan teknisi otomotif roda 2 dan membatik.
 - e. Ruang kelas boga digunakan untuk pelatihan tata boga.
6. Pada tahun 2017 gedung baru UPTD BLK Disnaker Kota Semarang Mijen telah selesai dibangun. Proyeksi mulai tahun anggaran 2017, kegiatan pelatihan untuk wilayah Semarang Barat akan dilaksanakan di gedung UPTD BLK Disnaker Kota Semarang nJl. RM Hadi Soebono S No. 122 Wonolopo Mijen Semarang.
7. Gedung UPTD BLK Disnaker Kota Semarang Mijen memiliki 6 ruang kelas dengan 6 jenis pelatihan, yang terdiri dari :
- a. 1 Ruang kelas Tata Kecantikan digunakan untuk pelatihan tata kecantikan dan desain batik.
 - b. 1 Ruang kelas Tata Boga digunakan untuk pelatihan tata boga dan retail.
 - c. 2 ruang kelas menjahit digunakan untuk pelatihan menjahit garmen, menjahit modiste, mekanik mesin jahit, dan border.

- d. 2 Ruang kelas Komputer digunakan untuk pelatihan desain grafis dan operator komputer.

2.3.2 Struktur Organisasi UPTD BLK Disnaker Kota Semarang

Gambar 2.2

Struktur Organisasi UPTD BLK Disnaker Kota Semarang



Sumber : Dokumen UPTD BLK Disnaker Kota Semarang

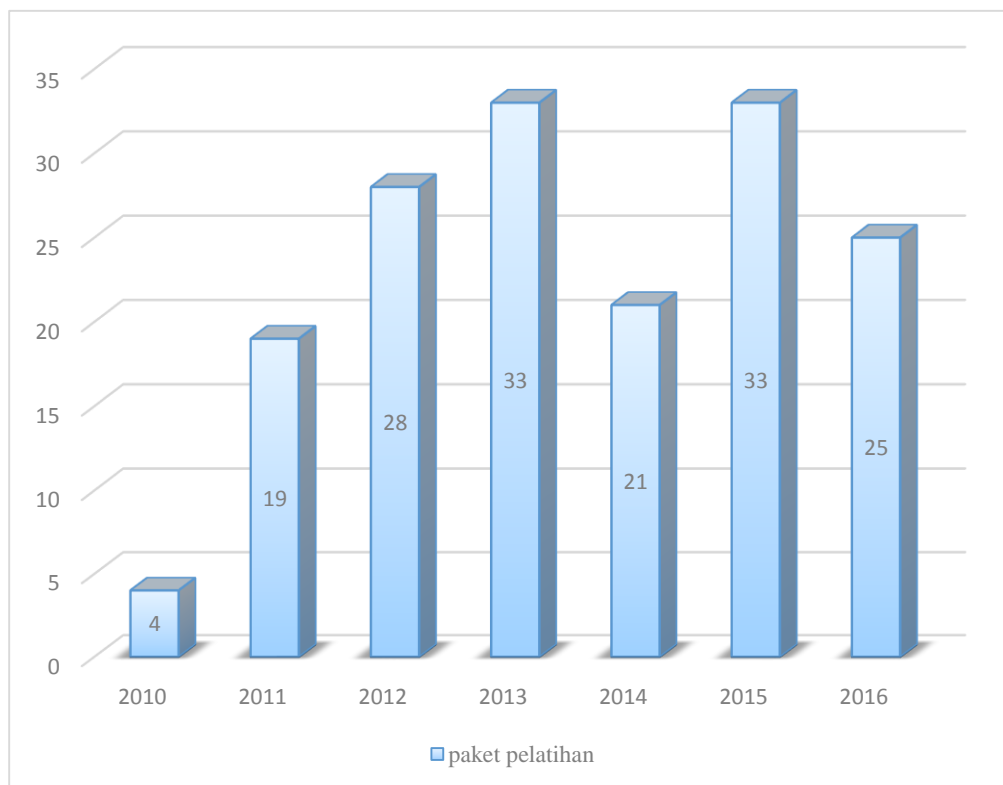
2.3.3 Paket Pelatihan

Paket pelatihan pada UPTD BLK merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelatihan yang ada pada UPTD BLK Disnaker Kota Semarang yang

dikelompokkan menjadi beberapa paket yang dibagi dalam jangka waktu beberapa bulan dalam satu tahun, penentuannya sesuai kapasitas dan kemampuan Balai Latihan Kerja Kota Semarang. Terjadi banyak perubahan dalam pengadaan paket dalam jangka waktu beberapa tahun belakangan, mulai tahun 2010-2016, berikut tabel jumlah paket pelatihan dari tahun 2010-2016 :

Gambar 2.3

Jumlah paket pelatihan dari tahun 2010-2016



Sumber : Dokumen UPTD BLK Disnaker Kota Semarang

2.3.4 Jenis Pelatihan

Jenis pelatihan merupakan pilihan pelatihan yang disediakan oleh UPTD BLK Disnaker Kota Semarang guna memenuhi kebutuhan keterampilan masyarakat Kota Semarang melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Semarang. Terdapat beberapa jenis pelatihan yang disediakan yaitu :

Gambar 2.4

Daftar jenis pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Disnaker Kota Semarang

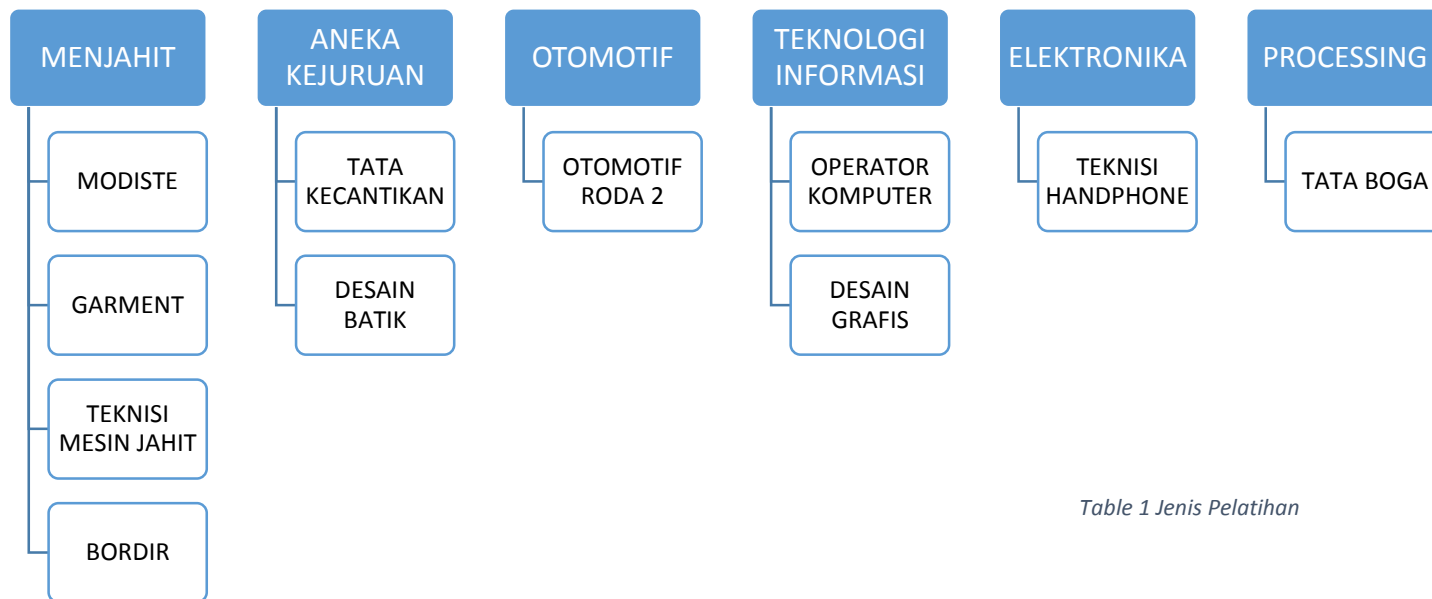


Table 1 Jenis Pelatihan

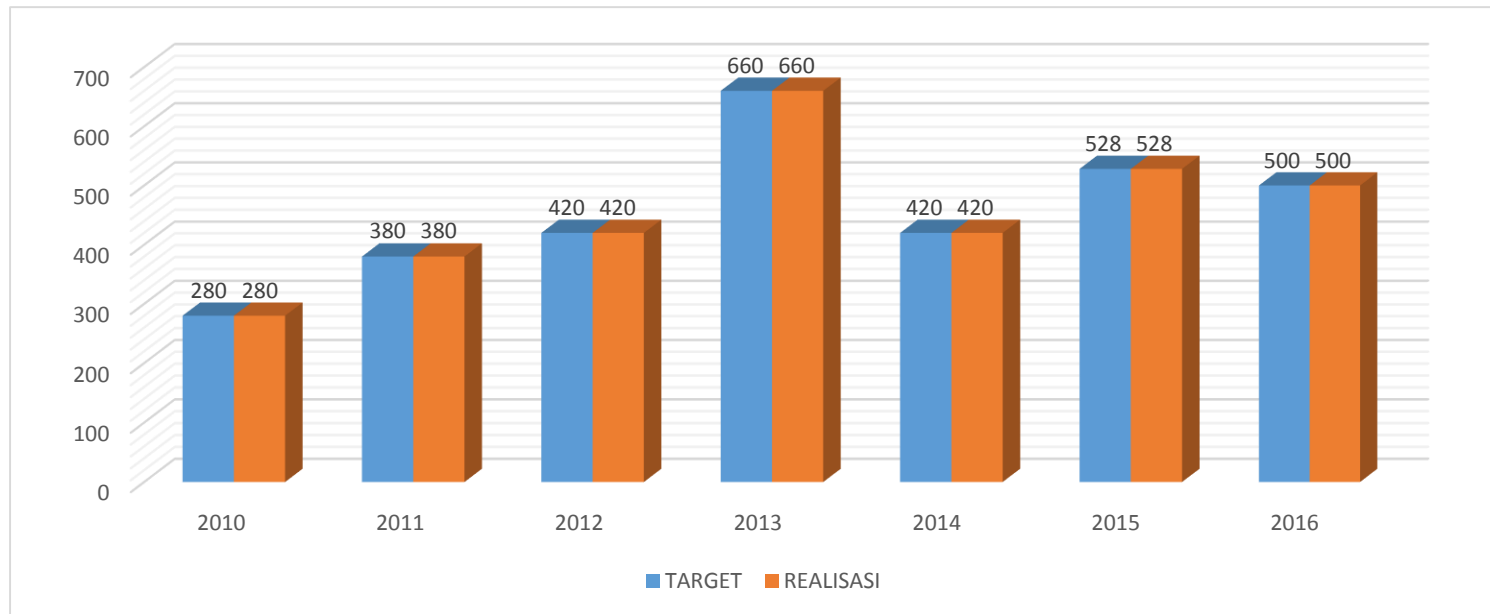
Sumber : Dokumen UPTD BLK Disnaker Kota Semarang

2.3.5 Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di UPTD BLK Disnaker Kota Semarang dari tahun 2010-2016 yaitu :

Gambar 2.5

Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2010-2016



Sumber : Dokumen UPTD BLK Disnaker Kota Semarang

2.3.6 Penyebarluasan Informasi

Dalam upaya penyebarluasan informasi pelatihan, UPTD BLK Disnaker Kota Semarang melakukan berbagai cara guna informasi dapat sampai kemasyarakat sehingga peserta yang mendaftar akan semakin banyak guna mewujudkan tujuan utama yakni mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan social masyarakat Kota Semarang. Ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu proses penyebaran melalui:

- 1) Media cetak ;
- 2) Media elektronik ;
- 3) Pemasangan spanduk ;
- 4) Serta penyebaran leaflet ke kecamatan dan kelurahan serta lembaga pendidikan kejuruan.

Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya memuat tentang :

- 1) Jenis pelatihan ;
- 2) Persyaratan peserta ;
- 3) Tata cara pendaftaran (waktu, tempat, kelengkapan pendaftaran) ;
- 4) Tata cara memperoleh informasi pelatihan.

2.3.7 Pendaftaran Peserta

Pendaftaran peserta dilakukan sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh pihak UPTD BLK Disnaker Kota Semarang, yaitu calon peserta mendaftar dengan membawa persyaratan foto copy KTP, foto copy ijazah, foto berwarna 3 x 4 = 4 lembar melalui :

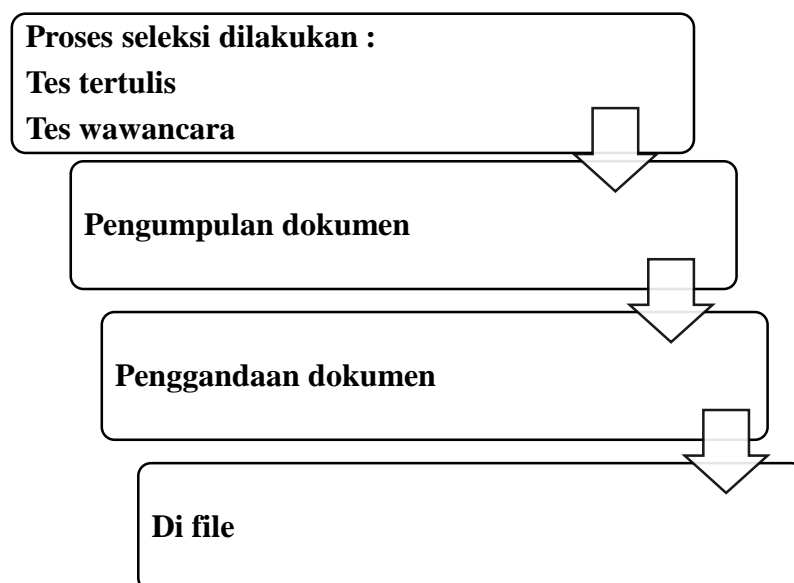
- 1) Kecamatan/Kelurahan ;
- 2) Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang Cq. UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang ;
- 3) Kantor UPTD BLK Disnaker Kota Semarang.

2.3.8 Seleksi Calon Peserta

Dalam seleksi calon peserta, tidak semua peserta yang mendaftar dapat diterima di UPTD BLK Disnaker Kota Semarang untuk mendapatkan pelatihan. Para pendaftar harus melalui proses seleksi yang bertujuan agar program ini benar-benar tepat sasaran dan dapat berdampak baik guna mengatasi pengangguran di Kota Semarang. Berikut proses dalam seleksi calon peserta.

Gambar 2.6

Proses pendaftaran dan seleksi peserta pelatihan



Disnaker Sumber : Dokumen UPTD BLK Kota Semarang

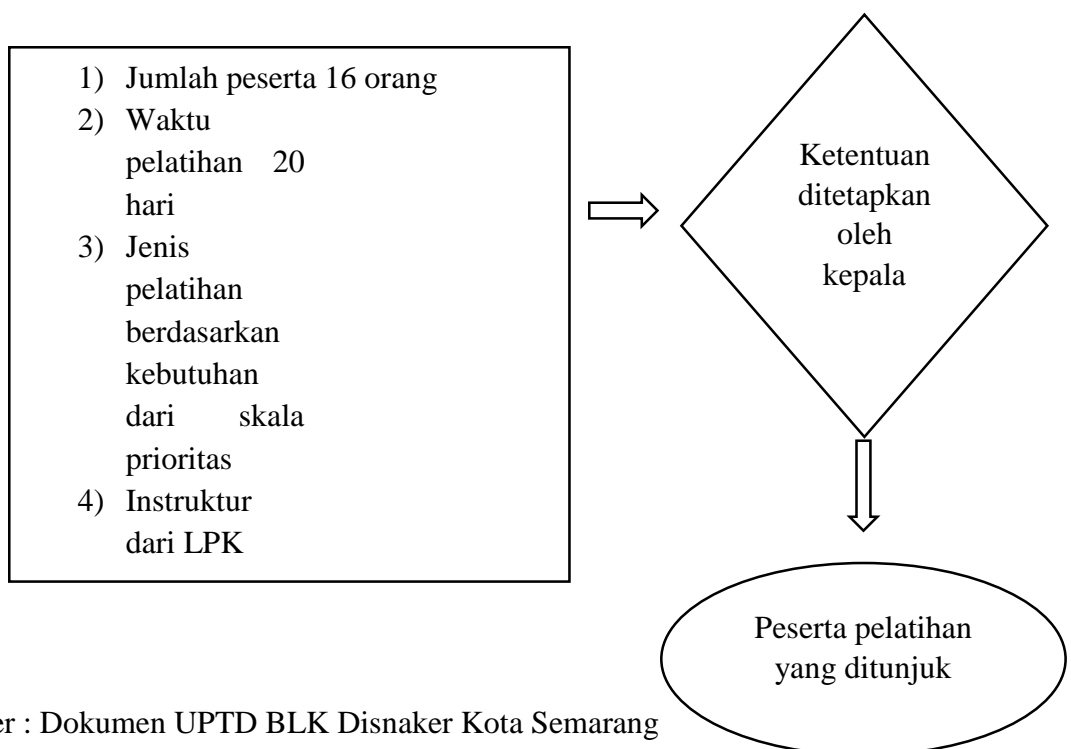
2.3.9 Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan yang diterapkan di UPTD BLK Disnaker Kota

Semarang yaitu :

Gambar 2.7

Proses pelaksanaan pelatihan



Sumber : Dokumen UPTD BLK Disnaker Kota Semarang